

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KELURAHAN TEMANGGUNG I  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	6
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	7
Beban	8
Aset	8
Kewajiban	9
Ekuitas Dana	10
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	10
<b>BAB IV</b>	13
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	13
<b>BAB V</b>	16
<b>PENUTUP</b>	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Temanggung I sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Temanggung I Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 816.644.571,00 (Delapan ratus enam belas juta Enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) atau tercapai 98,38% dari target sebesar Rp 830.059.600,00 (Delapan Ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau 0,20 % dari total belanja
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 814.994.571,00 (Delapan Ratus empat belas Juta sembilan Ratus sembilan Puluh empat Ribu lima Ratus Tujuh Puluh satu rupiah) atau 99,79% dari total belanja

#### **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung TA. 2022 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

**3.1.1. Pendapatan - LRA**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	0	0	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	0
4102	Retribusi Daerah	0	0	0
410201	Retribusi Jasa Umum	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0

Dari tabel diatas secara keseluruhan untuk Kelurahan Temanggung I tidak mempunyai pendapatan.

**3.1.2. Belanja**

Realisasi APBD Tahun 2022 pada Kelurahan Temanggung I sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 untuk OPD Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

**REALISASI ANGGARAN (OBJEK)**

**KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	830.059.600	816.644.571	(13.415.029)
51	BELANJA OPERASI	830.059.600	816.644.571	(13.415.029)
5101	Belanja Pegawai	1.950.000	1.650.000	(300.000)

5102	Belanja Barang dan Jasa	828.109.600	814.994.571	(13.115.029)
52	BELANJA MODAL	0	0	0
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>830.059.600</b>	<b>816.644.571</b>	<b>(13.415.029)</b>

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp.816.644.571,- atau tercapai 99,79 % dari target sebesar Rp. 830.059.600,-

### 1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang/ jasa. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,00 atau 84 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.950.000,00.
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp.814.994.571 atau 98,41% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 828.109.600.

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan.

### 2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Temanggung I Tidak Memiliki Belanja Modal

#### 3.1.3 Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	0
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0

7102	Retribusi Daerah-LO	0
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	0
	Jumlah Pendapatan	0

### 3.1.4 Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	810.371.369
81	BEBAN OPERASI	810.371.369
8101	Beban Pegawai	1.650.000
8102	Beban Barang dan Jasa	808.721.369
	Jumlah Beban	810.371.369

### 3.1.5 Aset

- a. Aset lancar  
- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 sebesar 0,-.

- Persediaan

Persediaan	2022	2021
	Rp.	Rp.
Alat Tulis Kantor	386.000	224.000
Kertas dan Cover	857.500	116.600

Bahan Cetak	0	0
Benda Pos	0	0
Bahan Komputer	0	0
Perabot Kantor	0	0
Alat Listrik	116.000	0
Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.800	66.000
<b>Jumlah persediaan</b>	<b>1.432.300</b>	<b>466.200</b>

b. Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	2.325.537.000	0	0	2.325.537.000
Peralatan dan Mesin	360.349.050	0	0	360.349.050
Gedung dan Bangunan	820.996.750	0	0	820.996.750
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.300.600	0	0	10.300.600
Aset Tetap Lainnya	66.500	0	0	66.500
Jumlah				3.517.249.900

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp 3.517.249.900,00. Jumlah tersebut sesuai dengan neraca awal tahun 2022 Karena pada Tahun 2022 tidak terdapat penambahan atau pengurangan Aset Tetap .

**3.1.3. Kewajiban**

1. Kewajiban Jangka Pendek

1.

Kewajiban Jangka Pendek	2022	2021
	Rp.	Rp.
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0	0
Utang belanja	5.365.425	5.307.102

<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>		5.307.102
<b>Kewajiban</b>	5.365.425	

Sampai dengan 31 Desember 2022 di Kelurahan Temanggung I mempunyai Kewajiban Jangka pendek sebesar Rp . 5.365.425,- Honor Pegawai Non PNS bulan Desember sebesar Rp. 5.365.425,- yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya atau awal tahun 2023.

#### 3.1.4. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas	2022	2021
	Rp.	Rp.
Ekuitas Awal	2.818.421.803,56	2.859.768.581,03
Surplus / (Defisit) LO	(815.371.369,00)	(796.297.356,47)
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	352.285.934,00	<b>0,00</b>
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	464.358.637,00	754.950.579,00
<b>Ekuitas</b>	<b>2.819.695.005,56</b>	<b>2.818.421.803,56</b>

#### 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2022.

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 124.800.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 124.800.000,00	Rp
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 18.000.000,00	Rp
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 18.000.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Telepon	Rp 420.475,00	Beban Tagihan Telepon	Rp 420.762,00	Rp 287
Belanja Tagihan Air	Rp 1.371.650,00	Beban Tagihan Air	Rp 1.417.850,00	Rp 46.200
Belanja Tagihan Listrik	Rp 2.353.084,00	Beban Tagihan Listrik	Rp 2.364.920,00	Rp 11.836 -

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon ada selisih sebesar Rp 287,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 34.570,00 dan Rp 34.857,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Air sebesar Rp 46.200,00 karena

adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 74.200,00 dan Rp,120.400,00. Sedangkan pada pos Tagihan Listrik terdapat selisih sebesar Rp 11.836,00 selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 198.332 dan Rp.210.168,00

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan tahun ketujuh diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

#### **A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

##### **1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.

##### **2. ENTITAS AKUNTANSI**

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah Perangkat Daerah Kelurahan Temanggung I beserta alamatnya:

NO	Perangkat Daerah	Alamat
1	Kelurahan Temanggung I	Jl. Diponegoro No.28 Telp. (0293) 491786 Kode Pos : 56212

#### **B. BAGAN ORGANISASI SELAMA TAHUN BERJALAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	HERY SUYITNO, S.Sos	LURAH
2	MARYUDI S.A.P	SEKRETARIS KELURAHAN
3	DARUKI	BENDAHARA PENGELUARAN
4	ARI PRASTYO KUS SUHARDIMAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5	SEKTIJAWAN	PENGADMINISTRASI UMUM

Didukung oleh tiga orang tenaga Supporting Staff ( SS )

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUSTIN DWI NAVALIA	TENAGA ADMINISTRASI
2.	HERDY NUGRAHA	TENAGA KEAMANAN
3	VARA NARULITA DEFANTI	TENAGA KEBERSIHAN

### C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung antara lain meliputi :

#### 1. Letak Geografi

Kelurahan Temanggung I terletak pada titik koordinat :

Koordinat Bujur : 110.184232

Koordinat Lintang : -7.305705

Batas wilayah Kelurahan Temanggung I adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Walitelon Selatan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jampiroso

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Temanggung II

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banyuurip

#### 2. Keadaan alam

Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung memiliki luas wilayah 29.86 Hektar dengan ketinggian tempat 550 Meter di atas permukaan laut. Secara geomorfologi Kelurahan Temanggung I memiliki kontur tanah datar, hampir datar dan landai. Adapun sungai yang ada di Kelurahan Temanggung I adalah Sungai Pacar.

### 3. Pembagian Wilayah Administratif

Pada Tahun 2022 Kelurahan Temanggung I Kecamatan Temanggung terbagi atas 8 Rukun Warga dan 34 Rukun Tetangga.

### 4. Kependudukan

Berdasarkan Data Aplikasi Kependudukan Kelurahan Temanggung I Tahun 2022, jumlah penduduk tercatat sebesar 4.053 jiwa, terdiri dari 1.982 jiwa laki-laki dan 2.071 jiwa perempuan

## **BAB V PENUTUP**

Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ) , sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi , Penegakan Hukum , Transparansi, Kesetaraan , Daya Tanggap , Wawasan kedepan , Akuntabilitas , Pengawasan , Efisiensi , Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

LURAH TEMANGGUNG I

HERY SUYITNO S.Sos  
NIP. 19670521 198607 1001